

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESELAMATAN LALU
LINTAS ANGKUTAN SUNGAI WADUK CIRATA DI BALAI
PENGELOLAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBRANGAN DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION ON
SAFETY QUALITY OF TRAFFIC TRANSPORT SERVICES IN
CIRCULAR RESERVOIR RIVER MANAGEMENT, LAKE AND
DISTRIBUTION OF PERHUBUNGAN DEPARTMENT, WEST JAVA***

Puri Fitriyani¹, Arnia Fajarwati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kualitas pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat). Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat)”.

Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dalam Winarno (2008 : 210),, berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel kualitas pelayanan digunakan pendekatan teori dari Parasurahman, Zeithaml dan Berry yang dikutip Tjiptono (2007:133) yakni Keandalan (*Reliability*),; Keresponsifan (*Responsiveness*), Keyakinan (*Confidence*), Empati (*Empathy*) dan Berwujud (*Tangibles*). Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat)”.

Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas

Perhubungan Jawa Barat). Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai

ABSTRACT

The problem in this research is The Service of Traffic Safety Service of Cirata Reservoir River Transportation (Study at River Transportation Management Center, Lake and Crossing of West Java Transportation Department) still in low quality. Based on the phenomenon, the researchers suspect that the problem is influenced by policy implementation variables. Based on the problem, the formulation of the proposed problem is: "How big is the influence of government policy implementation on the Quality of Traffic Safety Service of Cirata Reservoir River Transportation (Study at River Transportation Management Center, Lake and Crossing of West Java Transportation Department)".

The analysis of research problem is done by using Edward III Policy Implementation theory in Winarno (2008: 210),, based on the factors of policy implementation through the dimension of Communication, Resources, Disposition / Executor Attitudes and Structure of Bureaucracy. As for the variables of service quality used theoretical approach of Parasurahman, Zeithaml and Berry djutip Tjiptono (2007: 133) namely Reliability (Realibility) ;; Respondiveness, Confidence, Empathy and Tangibles Based on the theoretical approach, the hypothesis proposed is: "The magnitude of influence of Government policy implementation on the Quality of Service of Traffic Safety Safety of Cirata River Reservoir River (Study On River Transportation Management Center, Lake and Crossing of West Java Transportation Department) ".

Methods in this research is explanatory survey method while the source of data collection by using literature study and field study covering: questionnaire, observation, and interview. Sampling technique used is simple random sampling. The data analysis technique used is linear regression analysis.

Based on the results of data processing conducted obtained the results of research showing a positive and significant relationship between the implementation of the policy on the Quality of Traffic Safety Service Transportation River Cirata Reservoir (Study at River Transportation Management Center, Lake and Crossing Department of Transportation West Java). Thus the hypothesis proposed in this research is empirically tested.

Keywords: Policy Implementation, Traffic Safety Service of River Transportation

1. PENDAHULUAN

Angkutan sungai dan danau sejatinya sangat diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antar-

pulau, sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman. Aspek penunjang Angkutan Sungai dan Danau antara lain : Dermaga, Jaringan, Kapal, Lalu lintas dan Angkutan

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana perintah Menteri Perhubungan terus berusaha meningkatkan kinerja keselamatan

angkutan sungai dan danau, dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta memberikan bimbingan teknis terkoordinasi dengan instansi yang terlibat terhadap peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas di sungai dan danau. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kelancaran operasional dan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, serta memberikan pengetahuan kepada para operator akan pentingnya perlengkapan keselamatan angkutan sungai dan danau. Keselamatan transportasi merupakan suatu kebutuhan yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan transportasi khususnya angkutan sungai dan danau, sehingga perlu senantiasa berupaya meningkatkan keselamatan transportasi secara terus-menerus.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Darat No. SK.1818/AP.403/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dijelaskan bahwa, “untuk menjamin penyelenggaraan angkutan sungai yang memenuhi aspek keselamatan, perlu dilaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas bidang angkutan sungai dan danau”

Salah satu waduk yang berpotensi adalah Waduk Cirata di zona 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Banyaknya potensi yang dimiliki waduk memerlukan perhatian dari pemerintah untuk pembangunan dan pengelolannya, karena dapat menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya di sekitar waduk.

Waduk Cirata terbentuk dari adanya genangan air seluas 66 km² akibat pembangunan waduk yang membendung Sungai Citarum. Genangan waduk tersebut tersebar di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Purwakarta dan Bandung. Genangan air terluas terdapat di Kabupaten Cianjur dengan luas 29.603.299 m², yang kemudian dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata rekreasi berbasis air. Objek wisata Jangari terletak di Desa Bobojong, Kecamatan Mande berjarak 17 km dari pusat kota Cianjur, memiliki luas sekitar 15 ha dan Calingcing berlokasi di Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang, sekitar 20 km dari kota Cianjur memiliki luas sekitar 5 ha. Kegiatan wisata Tirta belum banyak dimanfaatkan secara optimal di waduk Cirata, yang sebenarnya bila dikembangkan lebih jauh akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan manfaat psikologi bagi individu yang melakukan aktivitas wisata.

Sekalipun pemerintah sudah menerbitkan peraturan kebijakan untuk keselamatan angkutan sungai dan danau, namun tingkat kecelakaan angkutan sungai dan danau saat ini masih cukup tinggi. Tidak terkecuali di Waduk Cirata. Hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kelaikan angkutan yang digunakan dan faktor manusia yang seringkali mengabaikan standar keselamatan yang ada. Selain itu sosialisasi dalam kesadaran berkeselamatan dalam transportasi sangat minim adanya yang berakibat kelalaian terhadap pengguna angkutan sungai. Dari hasil pengamatan peneliti melalui observasi di Waduk Cirata, dapat dianalisis secara aspek pelayanan keselamatan, prasarana

(sungai dan danau), sarana (kapal), SDM dan pengguna angkutan sungai dan danau, serta penanganan pasca kecelakaan masih minim.

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan belum optimalnya pelayanan keselamatan Lalu lintas angkutan Sungai Waduk Cirata antara lain :

1. Dari 1000 kapal yang beroperasi di Waduk Cirata selama Tahun 2016 sebanyak 312 buah kapal tidak memenuhi \standard operasi laik jalan, tentunya hal ini sangat membahayakan penumpang, masih rendahnya pelayanan yang diberikan oleh para pemilik kapal untuk keselamatan penumpang di Waduk Cirata dimana masih banyak kapal yang tidak laik jalan tetapi masih dibiarkan beroperasi. Padahal sudah ada standar perlengkapan keselamatan kapal angkutan sungai, tetapi pemeriksaan perlengkapan keselamatan tersebut belum dilakukan secara maksimal.
2. Masih banyaknya kapal yang melakukan pemberangkatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan
3. Fasilitas alat-alat penyelamat seperti ban pelampung, baju pelampung, tali temali, tidak sepenuhnya tersedia di dalam sebagian kapal.,baju pelampung berserakan begitu saja tidak digunakan.
4. Masih banyak para petugas kapal yang kurang tanggap dalam melayani keluhan penumpang
5. Jaminan keselamatan penumpang masih kurang. Masih banyak kapal angkutan yang beroperasi belum memenuhi standar kelaikan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
6. Pengendalian fungsi alur sungai termasuk perambuan lalu lintas sungai masih kurang terpenuhi
7. Ketegasan dalam penerapan keselamatan ASD masih lemah, seperti penggunaan

baju pelampung, alat navigasi, dan lain-lain.

Untuk mempermudah memberikan arah bagi pembahasan, peneliti mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut : “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata Pada Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Jawa Barat”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai kerangka teoritis di dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk itu peneliti berpedoman kepada beberapa pendapat dari para ahli tentang implementasi kebijakan antara lain, pendapat Nugroho (2003:158) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi kebijakan adalah suatu tahap pelaksanaan kebijakan yang memobilisasikan sumberdaya organisasi oleh unit-unit organisasi pelaksana di tingkat bawah Edward III (1980:1). Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi dan lingkungan organisasi yang membuat kebijakan. Potensi dan kondisi sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya buatan lain sangat

mempengaruhi implementasi kebijakan. Pengaruh lingkungan baik secara politik, ekonomi maupun sosial sedikit banyaknya ikut mendukung keberhasilan sebuah kebijakan untuk diimplementasikan atau justru malah menggagalkan implementasi kebijakan.

Salah satu aspek penting dalam konsep kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Pengevaluasian suatu proses kebijakan mengandung suatu konstelasi yang berkaitan antara perumusan dengan implementasi kebijakan yang dimaksud. Akan tetapi jika melihat kepada tingkat signifikan yang diperoleh masyarakat, maka implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting, mengingat berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Udjodi dalam Wahab (2001:45) bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin yang lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan tapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (*the execution of politics is as important if not more important than policy making, policies all remains dreams or blue prints in file sakes then are implemented*)

Bertitik tolak dari beberapa gambaran definisi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik langsung

maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (stakeholders) dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (intended) juga yang diharapkan (spillover/negative effects).

Faktor faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:10-11) dapat didekati melalui “*Four critical factors or variables in implementing public policy: Communication; Resources, Dispositions or attitude and Bureaucratic Structure*” yang secara simultan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas tersebut dengan membahas seluruh faktor faktor terkait sekaligus. Penjelasan lebih lanjut tentang faktor faktor dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward III dalam Winarno (2008 : 210), adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi;

Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan jika terjadi komunikasi yang efektif antara para pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Yaitu penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana (implementors) secara tepat sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Agar supaya implementasi dapat efektif, siapa saja yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Perintah

untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personil yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten.

2. *Resources* (Sumberdaya)

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumberdaya yang penting meliputi staf dengan jumlah yang sesuai serta keahlian yang memadai, informasi yang memadai dan relevan mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan, kewenangan dan fasilitas (termasuk bangunan/gedung, peralatan, tanah).

3. *Disposition* (Sikap)

Kecenderungan-kecenderungan atau perilaku para pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Agar implementasi dapat berjalan efektif, pelaksana (implementor) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Budaya kerja dan etos kerja pelaksana dapat menjadi pendukung efektifnya sebuah kebijakan dilaksanakan atau dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan tergantung pada budaya atau perilaku yang terbentuk pada pelaksana kebijakan., tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan Sikap dan komitmen ini diperlukan dari para pelaksana yang menjadi implementor

dari program yang telah disusun, dalam hal ini para pelaksana yang dimaksudkan terutama adalah aparatur birokrasi.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Faktor keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Struktur Birokrasi. Birokrasi sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah faktor yang secara signifikan dalam implementasi kebijakan. Birokrasi yang terdiri dari mekanisme kerja atau disebut dengan standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi yang terjadi di lingkungan birokrasi adalah dua hal dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Keempat faktor penting tersebut di atas, mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan melingkupi dalam menjalankan suatu kebijakan publik sehingga diharapkan atau dipandang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan, bahkan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

Selanjutnya peneliti mengemukakan pengertian kualitas pelayanan dari Nasution (2004:47) bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan Masyarakat/pelanggan.

Sedangkan definisi strategis dari kualitas menurut Nawawi (2000:124) memberikan pengertian kualitas dengan mengutip pendapat Wayne F Cassio yang

mengatakan bahwa “*quality is the extent to which products and services conform to costumer requirement*”.

Semua pengertian kualitas yang pernah dikemukakan, jelas berorientasi pada organisasi profit dalam melaksanakan proses produksi, yang menunjukkan bahwa kondisi produk sebagai hasilnya harus memenuhi beberapa tolok ukur tertentu. Pada organisasi non profit bidang pemerintahan berlaku juga pengertian tersebut, karena tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan umum (*public service*), yang berarti juga konsumennya adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan (*service*) sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Menurut Parasurahman, Zeithaml dan Berry yang dikutip Tjiptono (2007:133), untuk mengevaluasi kualitas jasa pelanggan umumnya menggunakan 5 dimensi adalah sebagai berikut :

a. *Tangibles* / Bukti langsung

Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi *tangibles* ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak image perusahaan.

b. *Reliability* / Keandalan

Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan

secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsur dimensi *reliability* ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat.

c. *Responsiveness* / Ketanggapan

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan.

d. *Assurance* / Jaminan

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employee untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat

penting karena melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi ketrampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti, reputasi perusahaan, prestasi dan lain-lain.

e. *Emphaty* / Empati

Empathy merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses (*access*) yaitu kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi merupakan kemampuan melakukan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor seperti

kemampuan karyawan perusahaan menghadapi pelanggan, akan tetapi lebih penting lagi bagaimana perusahaan dengan segala sumber daya yang dimilikinya dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya kepuasan pelanggan akan muncul apabila sesuatu yang mereka harapkan dari layanan jasa tertentu terpenuhi. Dengan kata lain, antara harapan dengan layanan yang mereka rasakan tidak berbeda sama sekali.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata Pada Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Jawa Barat ditentukan oleh pelaksanaan faktor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap (*disposisi*), dan Struktur Birokrasi”.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (*Explanatory Research*) yang dimana data informasi dapat dikumpulkan dari populasi, yang hasil datanyadikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber yaitu Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana..

4 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kua litas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata di Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Jawa Barat)”

Analisis Regresi Linear Sederhana dilakukan untuk mengetahui perubahan

variabel bebas dalam hal ini adalah Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah akan mempengaruhi variabel tidak bebas dalam hal ini Variabel Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata. Adapun hasil perhitungan persamaan Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan SPSS V.21 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.193	3.033		-.393	.695
Implementasi Kebijakan	1.066	.084	.792	12.640	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan
Sumber : Pengolahan Data SPSS V. 21

Dari tabel di atas akan dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -1,193 + 1,066 X$$

Dimana :

X = Variabel Implementasi Kebijakan Pemda

Y = Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata

Persamaan Regresi tersebut memperlihatkan bahwa apabila Implementasi Kebijakan Pemda terjadi kenaikan satu satuan, maka Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata akan terjadi kenaikan sebesar 1,066 satuan. Kemudian konstanta yang bernilai -1,193 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi

perubahan terhadap variabel Implementasi Kebijakan Pemda maka Variabel Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata nilainya akan turun sebesar 1,193 satuan.

4.2 Perhitungan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh akan dihitung nilai Koefisien Determinasi dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Koefisien Determinasi (KD)} = r^2 \times 100\%$$

Dimana nilai r adalah nilai korelasi atau hubungan antar variabel, nilai korelasi tersebut dapat diperoleh pada tabel sebagai berikut :

Tabel.4.2
Nilai Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	.627	.623	6.74035

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pada tabel di atas dapat ditentukan nilai korelasinya adalah sebesar 0,792. Dari nilai korelasi tersebut dapat diperoleh nilai Koefisien Determinasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Koefisien Determinasi (KD)} \\ &= (0,792)^2 \times 100\% \\ &= 0,627 \text{ atau } 62,7\% \end{aligned}$$

Ini memperlihatkan bahwa Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemda terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata adalah sebesar 62,7% dan sisanya sebesar 37,3% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata yang tidak diteliti.

4.3 Uji Hipotesis

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_0 : \rho \neq 0 \text{ Tidak terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemda Terhadap Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu}$$

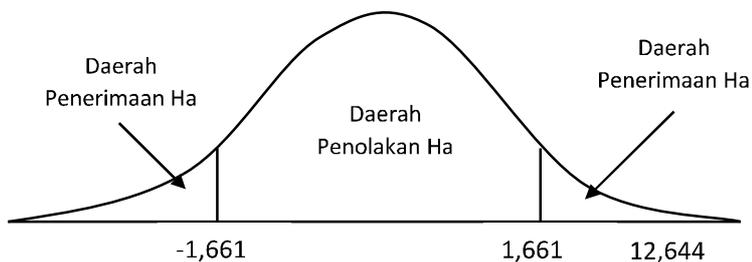
lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata Terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemda Terhadap Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata

$$H_a : \rho = 0$$

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t &= rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}} \\ t &= 0,792 \sqrt{\frac{97-2}{1-0,792^2}} \\ t &= 12,644 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,661. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 1,661 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,661 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal t sebagai berikut :



Gambar. 4.1
Kurva Penerimaan H_a dan Penolakan H_a

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 12,644 berada pada daerah penerimaan H_a , artinya bahwa t tabel lebih besar dari t hitung, atau H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata.

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

Dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah telah banyak model-model yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi untuk menganalisis Implementasi Kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan teori sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2008:220), yang terdiri dari 4 (empat) faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Dimana indikator yang diajukan seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) indikator. Dari masing-masing faktor yang terdapat dalam variabel

Implementasi Kebijakan dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada Dimensi Komunikasi adalah sebesar 929. Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Komunikasi dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. Artinya Kepala Balai Pengelolaan Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan belum sepenuhnya melaksanakan dimensi komunikasi sebagaimana disampaikan oleh dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward III dalam Winarno (2008 : 210), yang menjelaskan bahwa, Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan jika terjadi komunikasi yang efektif antara para pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Yaitu penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana (*implementors*) secara tepat sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Agar supaya implementasi dapat efektif, siapa saja yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan harus

mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada personil yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten.

Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data, diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada Dimensi Sumber-Sumber adalah sebesar 1282.. Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Sumber-Sumber dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Sumber Daya dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. Artinya Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat sudah cukup memadai dalam melaksanakan Peraturan Kementerian Perhubungan Darat No. SK.1818/AP,403/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. Menurut Edward III dalam Winarno (2008:210) menyebutkan bahwa walaupun ketiga faktor dalam proses komunikasi terpenuhi, namun tanpa dukungan sumberdaya (manusia dan fasilitas) yang handal dan memadai, implementasi kebijakan tidak akan efektif. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana adalah sebesar 604. Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. . Artinya Aparat pelaksana operasional Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Jawa Barat sudah menunjukkan sikap dan dukungannya terhadap Peraturan Kebijakan Pemerintah. Menurut Edward III dalam Winarno (2008:210) Kecenderungan-kecenderungan atau perilaku para pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Agar implementasi dapat berjalan efektif, pelaksana (implementor) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Budaya kerja dan etos kerja pelaksana dapat menjadi pendukung efektifnya sebuah kebijakan dilaksanakan atau dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan tergantung pada budaya atau perilaku yang terbentuk pada pelaksana kebijakan., tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan Sikap dan komitmen ini diperlukan dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program yang telah disusun, dalam hal ini para pelaksana yang dimaksudkan terutama adalah aparatur birokrasi Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data diperoleh nilai pada Variabel Implementasi Kebijakan pada Dimensi Struktur Birokrasi adalah sebesar 589. Nilai tersebut berada pada interval

penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pada Dimensi Struktur Birokrasi dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. Artinya dimensi Struktur Birokrasi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Jawa Barat. Menurut Edward III dalam Winarno (2008:210) mengatakan bahwa, Birokrasi sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah faktor yang secara signifikan dalam implementasi kebijakan. Birokrasi yang terdiri dari mekanisme kerja atau disebut dengan standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi yang terjadi di lingkungan birokrasi adalah dua hal dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil pengujian, Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Kualitas Pelayanan adalah sebesar 62,7% dan sisanya sebesar 37,3% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata yang tidak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang cukup besar pengaruhnya dan belum dikaji pada penelitian ini, yaitu variabel pengendalian.

Alasan peneliti menerapkan variabel pengendalian sebagaimana temuan peneliti dilapangan terkait dengan pelayanan keselamatan lalu lintas angkutan sungai di Waduk Cirata banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para awak kapal angkutan sungai. Menurut Strong yang dikutip oleh Hasibuan (2001:24) Pengendalian adalah: "Proses

pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana".

5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Sungai di Waduk Cirata. Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan memberi pengaruh terhadap Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Sungai di Waduk Cirata, melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain sebesar 37,3% yang mempengaruhi Variabel Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata yang tidak diteliti selain variabel Implementasi Kebijakan yang turut mempengaruhi Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain implementasi kebijakan, yaitu Pengendalian sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap, Kualitas Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk memberikan sanksi secara tegas kepada para pemilik kapal angkutan sungai yang masih mengoperasikan kapal angkutan sungai yang sudah tidak laik jalan di Waduk Cirata
2. Hendaknya para awak kapal angkutan sungai lebih tanggap pada saat menerima kritik dan saran dari para penumpang angkutan sungai..
3. Sebaiknya Kepala Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata Menambah fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas, seperti dermaga, gedung pos pengawasan.
4. Disarankan kepada Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk segera menyediakan SOP Keselamatan

Lalu Lintas Angkutan Sungai Di Waduk Cirata.,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- .
Edward III. C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Nasution. 2004. *Prospek pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PN. Gunung Agung.
- Nawawi Hadan, 2000 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan ke 6 Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Tjiptono, Fandy. 2000. *Prinsip Prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa. Samodra dkk, 2002. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta Infomedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo.

B. Dokumen dan Sumber Lain :

Republik, Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015* tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23

Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia.